

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.⁹

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu:

⁹ Andi Tenripadang, 2016, "*Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, Hal. 67.

1. Hukum Internasional Regional.

Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

2. Hukum Internasional Khusus.

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.¹⁰

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anantara anggota masyarakat internasional yang sederajat.¹¹

¹⁰ *Ibid*, Hal. 68.

¹¹ *Loc.Cit.*

Sementara itu dalam hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, terdapat dua aliran yang berkembang, yaitu aliran *dualisme* dan aliran *monoisme*.¹² Yang pertama adalah aliran *dualisme*, aliran ini menjelaskan bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Pada aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Atau bisa disimpulkan bahwa dalam teori aliran *dualisme* tidak ada persoalan hirarki antara hukum nasional dengan hukum internasional, karena pada dasarnya kedua perangkat hukum ini berbeda dan berdiri sendiri. Tidak hanya itu, akibat selanjutnya, apabila hukum internasional ingin dijadikan hukum nasional maka memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Dan dapat disimpulkan hukum internasional hanya akan berlaku dan ditaati apabila telah menjadi hukum nasional.¹³

Yang kedua adalah aliran *monoisme*, aliran ini berkembang dengan pengertian bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dalam aliran *monoisme* berkembang

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, Hal. 56

¹³ *Ibid*, Hal. 57

dua paham baru yaitu aliran *monoisme* dengan primat internasional dan aliran *monosime* dengan primat nasional.¹⁴

Menurut aliran *monoisme* dengan primat internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangannya merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Pada primat ini menganut pandangan bahwa hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.¹⁵

Sedangkan aliran *monosime* dengan primat nasional menjelaskan bahwa hukum internasional itu tidak lain dari merupakan lanjutan hukum nasional belaka, atau hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Alasan utama pada anggapan ini karena tidak adanya organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia. Selain itu dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.¹⁶

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar

¹⁴ *Ibid*, Hal. 60

¹⁵ *Ibid*, Hal. 62

¹⁶ *Ibid*, Hal. 61

sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia.¹⁷

Menempatkan hukum nasional dengan hukum internasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan yang lain yang seolah melihat hukum nasional dan hukum internasional senantiasa berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum nasional Indonesia dan hukum internasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya, hukum internasional akan menjembatani ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain. Seperti polisi Indonesia yang tidak bisa menangkap seorang buronan yang lari ke luar negeri maka Indonesia membutuhkan perjanjian ekstradisi dengan negara di mana buronan itu berada sekarang.¹⁸

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ Sefriani, S.H, M.Hum, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 98

2. Sumber-sumber Hukum Internasional

Sebenarnya tidak ada badan legislatif internasional yang berwenang untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara langsung kehidupan masyarakat internasional. Satu-satunya organisasi internasional yang kiranya bisa melakukan fungsi legislatif adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan seperti resolusi itu pun tidak mengikat, kecuali untuk kelangsungan organisasi internasional itu sendiri.

Menurut J.G Starke, sumber hukum internasional ada lima, yaitu:¹⁹

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional

Sedangkan menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional adalah:²⁰

1. Perjanjian internasional

Perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum

¹⁹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, Hal. 8

²⁰ *Loc. Cit*

internasional adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Konvensi senjata-senjata kimia tahun 1993.

2. Kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tentangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan.

3. Prinsip-prinsip hukum umum yang dipakai oleh negara-negara beradab.

Walaupun hukum nasional setiap negara berbeda, namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Seperti prinsip-prinsip hukum administrasi, perdagangan dan kontrak kerja.

4. Keputusan-keputusan Peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan perananyang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Contohnya seperti keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa-sengketa ganti rugi

dan penangkapan ikan yang telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional.

3. Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam pengertian yang umum dan luas, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.²¹

Sedangkan jika menilik pada pengertian dalam ruang lingkup yang lebih sempit, Perjanjian Internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.²²

Apabila menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pengertian dari perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²³

²¹ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bag. 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal.12.

²² *Ibid*, Hal. 13.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian internasional, yaitu:²⁴

- a. Kata sepakat,
- b. Subyek-subyek Hukum,
- c. Berbentuk tertulis,
- d. Obyek tertentu,
- e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional

4. Pengertian ratifikasi dan macam ratifikasi

Dalam bahasa latin klasik ratifikasi sering dinyatakan dengan “*Ratum habere*” yang berarti persetujuan. Dalam pada itu, *ratum habere* di satu pihak mengandung pengertian “Persetujuan yang memandang berlakunya suatu akta”. Jadi, jika dihubungkan dengan perjanjian, maka penetapan berlakunya perjanjian itu adalah secara formal, karena tanda tangan wakil-wakil berkuasa penuh telah menjadikan negara yang diwakili terikat pada isi perjanjian tadi.²⁵

Sedangkan menurut Convention on the Law Treaties yang dilaksanakan di kota Wina tahun 1969 menjelaskan bahwa arti ratifikasi adalah sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, Hal. 14

²⁵ Edy Suryono, SH, 1988, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, Hal. 24

“Ratification means each case the international act named where by a state establishes on the international plans its consent to be bound by a treaty.”

Ratifikasi di sini merupakan tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat dengan suatu perjanjian. Sehingga pada dasarnya Konvensi Wina menekankan pada persetujuan yang akan meningkatkan rencana perjanjian menjadi perjanjian yang berlaku mengikat bagi negara-negara peserta.²⁶

Sedangkan macam ratifikasi atau sistem dalam meratifikasi terhadap suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁷

1. Ratifikasi oleh badan eksekutif

Kepala negara sebagai badan eksekutif boleh mengikat, termasuk meratifikasi perjanjian internasional tanpa pengawasan dari badan negara yang lainnya yaitu badan legislatif.

2. Ratifikasi oleh badan legislatif

Suatu perjanjian baru mengikat apabila badan legislatif yang melakukan proses ratifikasi perjanjian internasional tersebut.

²⁶ *Ibid*, Hal. 25

²⁷ *Ibid*, Hal. 49

3. Ratifikasi oleh badan eksekutif dan legislatif

Kedua badan eksekutif dan legislatif berperan dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Dalam golongan ini terdapat dua pembagian lagi, yaitu:

- 1) Sistem campuran di mana badan legislatif lebih menonjol.

Dalam hal ini persetujuan parlemen diperlukan sebelum suatu perjanjian internasional diratifikasi oleh badan eksekutif. Biasanya cara ini banyak dilakukan di negara berpaham Eropa Kontinental.

- 2) Sistem campuran di mana badan eksekutif lebih menonjol.

Dalam sistem ini badan eksekutif yang melakukan ratifikasi, namun dalam keyataannya nasehat dan persetujuan parlemen mempunyai peranan yang menentukan pula bagi terselenggaranya proses ratifikasi suatu perjanjian internasional.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Internasional

1. Pengertian Hukum Pidana Internasional

Istilah Hukum Pidana Internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa dan

Amerika. Namun penulis di sini mengambil salah satu pengertian dari ahli yang berasal dari Amerika yaitu Bassiouni:

“Bahwa hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemikiran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana”.²⁸

Hukum Pidana Internasional terus menerus berkembang. Beragam jenis tindak kejahatan internasional pun juga ikut berkembang. Statuta Roma telah menetapkan apa saja tindak pidana yang termasuk kejahatan internasional. Tapi dilihat dari perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:²⁹

- 1) Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional;
- 2) Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; dan
- 3) Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Bassiouni telah menyebutkan bahwa terdapat 22 jenis kejahatan internasional. Yaitu:

²⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Hal.27

²⁹ *Ibid*, hal. 40

1. *Agression*
2. *War Crimes*
3. *Undawfull Use of Weapons*
4. *Crime Against Humanity*
5. *Genocide*
6. *Racial Discrimination and Apartheid*
7. *Slyvery and Related Crimes and Torture*
8. *Unlawful Human Experimentation*
9. *Piracy*
10. *Aircraft Hijacking*
11. *Threat and Use of Force Against Internationally Protected person*
12. *Taking of Civilian Hostages*
13. *Drug Offenses*
14. *International Traffic in Obscene Publication*
15. *Destruction and/or Theft of National Treasures*
16. *Environmental Protection*
17. *Theft of Nuclear Materials*
18. *Unlawful Use of the Mails*
19. *Interference of the Submarine Cables*
20. *Falsdication and Counterfeiting*
21. *Bribery of Foreign Public Officials.*³⁰

³⁰ *Ibid*, hal. 43

2. Penegakan Hukum Pidana Internasional

Secara teoritis penegakan hukum pidana internasional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:³¹

a. Penegakan hukum pidana internasional secara langsung

Dalam kata lain berarti *direct enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Internasional yang pada saat ini telah ada pengadilan permanen khusus untuk menangani kejahatan pidana internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional yang lahir berdasarkan Statuta Roma.

b. Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung,

Dalam kata lain berarti *indirect enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara di mana kejahatan internasional tersebut terjadi.

c. Penegakan hukum pidana dengan model campuran

Dalam kata lain berarti *hybird model* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum nasional dan hukum internasional seperti yang pertama kali dilakukan terhadap para pelaku *killing field* di kamboja.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal. 69

C. Tinjauan Umum tentang Statuta Roma/Mahkamah Pidana Internasional

1. Sejarah Statuta Roma/Mahkamah Pidana Internasional

Pada 17 Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu peletakan instrumen hukum dalam rangka pembentukan lembaga internasional yang sangat penting, yaitu dengan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, melalui *Rome Statute of The International Criminal Court 1998*. Suatu lembaga yang sifatnya berbeda dengan mahkamah/pengadilan-pengadilan *ad hoc* sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional ini bersifat permanen.³²

Hasilnya adalah 120 negara mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Di antara 7 negara yang menentang terdapat Amerika, Cina dan Irak. Hingga pada saat ini, tercatat sudah lebih dari 100 negara yang menjadi negara pihak dari Statuta Roma.³³

Mahkamah pidana internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda ini menggunakan bahasa resmi PBB yaitu bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Badan-badan Mahkamah Pidana Internasional ini meliputi kepresidenan, divisi banfing, divisi pengadilan, divisi prapengadilan, kantor jaksa penuntut umum dan kepaniteraan.³⁴

³² Arlina Permanasari, dkk., Jakarta, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of Red Cross, Jakarta, Hal. 190.

³³ *Op Cit.* Hal. 70

³⁴ *Ibid*, Hal. 71

2. Yurisdiksi Statuta Roma/Mahkamah Pidana Internasional

Kendatipun terdapat banyak sekali klasifikasi kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998, sebagai berikut:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- a) The crime of genocide;*
- b) Crimes against humanity;*
- c) War crimes;*
- d) The crime of aggression.”³⁵*

3. Penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional memiliki prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Statuta Roma, yaitu:³⁶

Pertama, bersifat komplementer. Artinya jika terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka

³⁵ Article 5 (1) Rome Statute of The International Criminal Court 1998.

³⁶ *Ibid*, Hal. 72

pengadilan terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu diserahkan pada hukum nasional negara di mana kejahatan tersebut dilakukan. Apabila negara tersebut tidak bisa atau tidak mau mengadili kejahatan tersebut maka Mahkamah Pidana Internasional akan maju untuk mengadili kejahatan tersebut.

Kedua, asas legalitas berlaku secara absolut dan tidak dimungkinkan penyimpangan terhadapnya selama menyangkut kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Ketiga, asas *ne bis in idem* yang berarti seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Tetapi dalam Statuta Roma, asas tersebut tidak berlaku mutlak. Maksudnya adalah asas tersebut dapat disimpangi jika pengadilan nasional yang mengadili pelaku kejahatan tersebut berjalan tidak *fair* atau bermaksud untuk membebaskan pelaku dari segala tuntutan.

Keempat, prinsip pertanggungjawaban pribadi sebagaimana yang dianut dalam hukum pidana.

Kelima, percobaan, penyertaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang merupakan yurisdiksi mahkamah.

Keenam, tidak mengenal relevansi jabatan resmi dan tidak berlaku tanggung jawab komando dan atasan lainnya.

Ketujuh, tidak dimasukkannya yurisdiksi anak-anak di bawah umur 18 tahun.

D. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Klasifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah kompetensi absolut pengadilan pidana, sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi:

“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

Dalam undang-undang tersebut, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Pada Pasal 7 berbunyi:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.”

3. Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui pengadilan Hak Asasi Manusia

Mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada pengadilan HAM, hukum acara yang digunakan atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang berbunyi:

“Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.”

Hukum acara yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), beserta perundangan terkait, seperti yang mengenai polisi, jaksa, dan kekuasaan kehakiman. Hukum acara Pidana yang dimaksud di sini adalah proses pemeriksaan perkara melalui

sistem peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan, penyidikan) dan penuntutan serta sidang pengadilan.³⁷

Bersarkan Pasal 18, penyelidik dalam penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melaksanakan tugas penyelidikan dapat membentuk tim *Ad Hoc* yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat.



³⁷ Soerdjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 57